

MASUK YOGYA TANPA MELALUI SKRINING

Rombongan Wisatawan Tak Tertib Sulit Dibendung

YOGYA (KR) - Rombongan wisatawan tidak tertib mengikuti aturan pemerintah dinilai sulit dibendung. Terutama yang masuk wilayah Kota Yogya dengan armada bus pariwisata tanpa melalui skrining atau pemeriksaan di Terminal Giwangan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menyebut wilayah Yogya merupakan daerah terbuka. Sehingga banyak pintu masuk yang dapat diakses oleh pengunjung. "Ini risiko sebagai daerah terbuka. Tapi kita selalu antisipasi agar semua bisa tertib, baik wisatawan atau siapa pun yang ada di Yogya," urainya, Senin (1/11).

Rombongan wisatawan yang dinilai tidak tertib tersebut memarkir armada bus di wilayah perbatasan atau toko oleh-oleh. Kemudian melanjutkan perjalanan ke pusat kota menggunakan armada lebih kecil baik angkutan online maupun sewaan.

Kendati demikian, Heroe mengatakan, kabupaten lain juga menerapkan pemeriksaan bus pariwisata yang melintas pada akhir pekan. Hal ini

karena sesuai instruksi Menteri Perhubungan semua bus pariwisata harus masuk ke terminal untuk dilakukan skrining. Terutama pemeriksaan kartu vaksin bagi seluruh penumpang yang dibawa. "Tapi meski di wilayah lain sebetulnya sudah dicek, mereka juga tetap masuk ke Terminal Giwangan. Di samping pengecekan ulang juga agar bisa memperoleh stiker parkir," tandasnya.

Dengan adanya stiker parkir tersebut maka setiap bus pariwisata sudah ada kepastian lokasi untuk memarkir armadanya. Alur lalu lintas yang harus dituju ke arah lokasi parkir pun telah ditentukan. Sehingga tidak lagi harus berputar-putar mencari tempat parkir yang bisa berimbas pada kepadatan arus lalu lintas di pusat kota. Skrining

atau kebijakan *one gate system* bagi bus pariwisata justru menjadi embrio penataan lalu lintas sekaligus menuju wisata sehat di Kota Yogya.

Heroe menegaskan, antisipasi wisatawan yang tidak tertib justru dilakukan dengan mencegah potensi kerumunan di wilayah destinasi wisata. Seperti akhir pekan kemarin, tim gabungan dari unsur Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Polresta dan Kodim Yogya diterjunkan guna menghalau kerumunan. Hanya, harus ada penguatan tim gabungan karena kerumunan yang harus dikendalikan karena tingkat keramaian yang cukup tinggi tiap akhir pekan.

Oleh karena itu, pihaknya pekan ini akan meluncurkan aplikasi Sugeng Rawuh guna membatasi kunjungan di Malioboro. Terutama durasi kunjungan dua jam untuk wisatawan di sepanjang Malioboro dan tiga jam untuk parkir armada bus. Pembatasan durasi tersebut harus menggunakan aplikasi khusus karena belum bisa diakomodir melalui PeduliLindungi. **(Dhi)-d**

BAKAL DIKELOLA SWASTA

Penanganan Sampah Harus dari Hulu

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat bakal turun gunung untuk menangani permasalahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUB). Hal ini dinilai menjadi solusi terbaik di tengah keterbatasan dana dari APBD maupun APBN.

Pemerintah harus mengajak sektor swasta karena dana pemerintah tidak cukup dan membutuhkan infrastruktur. Agar dapat masuk dengan proses yang terbuka, baik dan nyaman maka dari Kemenkeu menyediakan fasilitas *Project Development Facility* (PDF). Merupakan fasilitas yang disediakan untuk membantu swasta dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBUB.

"Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari penyediaan suatu proyek infrastruktur. Secara prinsip sudah disetujui oleh Menkeu.

Untuk itu hari ini kami hadir untuk memastikan, keinginan untuk membangun kapasitas pemusnahan di TPST Piyungan itu sudah jadi komitmen bersama. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif," kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Brahmantio Isdijoso ketika audiensi di DPRD DIY, Senin (1/11).

Pihaknya sengaja datang ke DPRD DIY, karena dalam proses KPBUB ini nantinya tetap akan menyangkut bagaimana pengembalian dananya oleh swasta oleh APBD. Dimana APBD harus ada persetujuan dari gubernur dan DPRD. Jika sejak awal kedua unsur ini siap bekerja sama, maka dari pusat akan segera memberikan dukungan PDF.

Ketika disinggung kapan hal ini akan berjalan, disesuaikan dengan kesiapan daerah. Dalam hal ini kecepatan penyelesaian pembebasan tanah. Karena

proyek tidak akan ditawarkan jika tanahnya belum siap. "Untuk penjamin dari BTPI untuk menyiapkan penjaminan agar proyek *bankable*. Jadi bukan hanya layak saja," urainya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta menyambut baik wacana ini. Mengingat TPST Piyungan sudah menjadi masalah sejak lama. Meski waktunya mundur dari rencana semula dapat selesai 2022. Namun pembahasan studinya baru dimulai di awal 2022 dan kemungkinan baru selesai 2024.

Ketua Project Management Unit Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan (PMU TP5) DIY Rani Sjamsinansi, mengatakan pihaknya menargetkan pengelolaan TPST Piyungan oleh swasta di 2024-2025. "Pembiayaan swasta dibutuhkan untuk kelola lahan baru seluas lima hektare. Lahan lama seluas 10 hektare kita tutup 2022 dan saat ini tengah disiapkan lahan sementara seluas 1,9 hektare," jelasnya. **(Awh/Bro)-d**

DUKUNG PEMBUKAAN DESTINASI WISATA

Pemuda Pancasila DIY Bagikan Ribuan Masker



KR-Istimewa

Faried Jayen Soepardjan bersama Haryadi Suyuti membagikan paket masker dan handsanitizer kepada warga.

YOGYA (KR) - Pemuda Pancasila (PP) DIY bersama Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3) DIY membagikan total 62.000 paket masker dan handsanitizer di seluruh DIY. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke-62 Pemuda Pancasila sekaligus wujud dukungan dibukanya destinasi wisata di DIY, agar sektor pariwisata bangkit.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP DIY, Faried Jayen Soepardjan mengatakan, pihaknya

mendukung semua kepala daerah di DIY terkait pembukaan destinasi pariwisata, seiring melandainya kasus covid dan status PPKM di level 2. "Dengan dibukanya objek-objek wisata, harapannya perekonomian di DIY bisa kembali bangkit," terang Jayen di sela pembagian masker dan handsanitizer bagi wisatawan dan pedagang di kawasan Malioboro Yogyakarta, Minggu (31/10).

Faried Jayen berpesan, meski kasus covid sudah

melandai, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, lantaran pandemi belum usai. Menurutnya, anggota dan pengurus PP DIY ikut berkontribusi dalam penanganan covid, seperti aksi bagi masker dan handsanitizer juga mengkampanyekan disiplin prokes.

Ketua BP3 PP DIY sekaligus istri dari Faried Jayen Soepardjan, Yuni Astuti menambahkan, selain pembagian masker dan handsanitizer, puncak peringatan HUT ke-62 PP ditandai peмотangan tumpeng, yang dihadiri Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Pemoთongan tumpeng dilakukan di Pasar Sore sebagai bentuk kedekatan PP dengan masyarakat kecil juga wujud kesederhanaan di tengah pandemi.

"Kami rayakan secara sederhana karena di tengah pandemi. Meski sederhana kami tetap ingin berbagi de-

ngan masyarakat. Semoga masyarakat tetap patuh dalam menjalankan prokes di tengah melandainya kasus Covid-19," ungkap Yuni Astuti yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Perindo DIY. **(Dev)-d**

MASUKI ERA PEMULIHAN

80 UMK Pasarkan Produk di Mal



KR-Ardhi Wahdan

Heroe Poerwadi meninjau produk UMK yang dipamerkan di Malioboro Mall.

YOGYA (KR) - Dinas Perdagangan Kota Yogya memfasilitasi 80 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memasarkan produknya di mal atau pusat perbelanjaan. Ajang tersebut diharapkan tidak sekadar menargetkan transaksi melainkan menjalin relasi.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Yudianto Dwisutono, menjelaskan pameran produk UMK ini merupakan salah satu upaya program pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. "Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah dan mengembangkan pemasaran produk UMK di Kota Yogya," katanya di atrium Mall Malioboro, Senin (1/11).

Delapan pelaku UMK yang difasilitasi terbagi di dua tempat. Masing-masing 40 UMK di Malioboro Mall pada 1-7 November dan 40 UMK di Galeria Mall pada 8-14 November 2021. Mereka ialah pelaku UMK di wilayah yang terdampak pandemi dengan produk fesyen, kulit, perak, dekorasi rumah, oleh-oleh serta kerajinan khas Yogya.

Yudianto berharap setelah mengikuti acara tersebut para pelaku UMK dapat bangkit di masa pandemi serta berdampak

positif terhadap produktivitas usaha mereka. "Semoga dengan saling bertemu ini mereka bisa saling bersinergi dalam mengembangkan produk, meluaskan akses pasar serta meningkatkan daya saing. Jadi tidak sekadar menggelar produk untuk dijual," urainya.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku optimis pelaku UMK di Kota Yogya dapat bangkit saat memasuki era pemulihan saat ini. Menurutnya dipilihnya mal untuk acara tersebut merupakan penanda awal dari kebangkitan tersebut. Hal ini karena selama pandemi mal adalah tempat yang sangat terbatas kegiatannya dan sudah memenuhi standar CHSE.

Heroe pun mendorong agar mal yang ada di Kota Yogya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMK untuk mengembangkan potensinya. Sehingga keberadaannya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Kota Yogya. "Ini juga kesempatan bagi para pelaku UMK agar terus meningkatkan kreativitas, kualitas produk serta promosi. Gunakan ajang ini sebagai sarana promosi, bisnis, dan motivasi untuk terus berkarya," pesannya. **(Dhi)-d**

Tinggi, Kepatuhan Terhadap PeduliLindungi

YOGYA (KR) - Aplikasi PeduliLindungi menjadi persyaratan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Termasuk saat melakukan aktivitas di pusat perbelanjaan, perkantoran maupun destinasi wisata.

"Lewat aplikasi PeduliLindungi ini diharapkan bisa mendeteksi apakah lokasi yang dikunjungi banyak terjadi penularan Covid-19 atau tidak. Dengan begitu seandainya ditemukan ada yang tertular Covid-19, penanganan (skrining) akan lebih mudah dilakukan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Rony Primanto Hari di Yogyakarta, Minggu (31/10).

Dikatakan, pemberian izin QR Code aplikasi PeduliLindungi sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kemenkes. Kendati demikian pihaknya tidak pernah bosan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya aplikasi PeduliLindungi. Termasuk kepada para pelaku usaha yang sempat mengeluhkan kesulitan mendapatkan QR

Code PeduliLindungi. Karena keberadaan aplikasi PeduliLindungi menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar di era normal baru.

"Berdasarkan laporan yang masuk dan hasil monitoring yang ada tingkat kepatuhan aplikasi PeduliLindungi cukup tinggi dan hampir mencapai 98 persen. Meski begitu kita tidak boleh lengah, termasuk dengan wisatawan dari luar daerah yang mulai berdatangan ke DIY juga perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka lengah dan mengabaikan penegakan Prokes," ungkap Rony.

Guna memudahkan pemantauan para pengusaha maupun pengelola tempat publik diminta memasang QR Code aplikasi PeduliLindungi. Karena keberadaan aplikasi tersebut sangat penting dalam masa pandemi seperti sekarang. Khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan tracing, sehingga terjadinya penularan bisa dicegah. **(Ria)-d**

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

DAMPAK PANDEMI DI SEKTOR PENDIDIKAN

PTM Momentum Kejar Ketertinggalan

YOGYA (KR) - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah mulai digulirkan harus menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Terutama dampak pandemi di sektor pendidikan yang turut merugikan anak didik dari segi kognitif maupun afektif.

Anggota DPRD Kota Yogya Bambang Anjar Jalumurti, menjelaskan selama dua tahun pandemi proses pendidikan banyak menerapkan sistem jarak jauh atau daring. "Jika diukur melalui target pengajaran atau kurikulum jelas capaian selama pandemi ini sangat rendah," urainya.

Menurutnya, selama pembelajaran jarak jauh masih ditemukan sejumlah kendala sehingga berdampak pada hasil yang kurang optimal. Kendala tersebut antara lain dari aspek infrastruktur atau sarana dan prasarana mulai akses internet, gadget hingga aplikasi yang digunakan. Selain itu sumber daya manusia dari tim pengajar juga belum sepenuhnya siap memberikan pengajaran secara daring. Akibatnya hasil yang dicapai pun masih jauh dari harapan dibanding pembelajaran tatap muka.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota

**Bambang Anjar Jalumurti
Fraksi PKS**



KR-Istimewa

Yogya ini berharap ada banyak inovasi selama proses pembelajaran tatap muka kali ini. Hal ini agar PTM bisa dioptimalkan dan mampu mengembalikan fungsi sekolah dalam mengejar ketertinggalan anak didik. "Selama dua tahun kemarin anak didik kehilangan waktu terbaiknya untuk belajar. Makanya kegiatan belajar mengajar tatap muka ini harus memunculkan terobosan untuk mengejar ketertinggalan," imbuh Bambang.

Ketertinggalan yang harus dikejar tidak semata aspek kognitif sesuai kurikulum pelajaran di sekolah, melainkan aspek afektif yang meliputi nilai sosial, pembangunan karakter dan

sebagainya. Kendati demikian proses belajar tatap muka harus mengedepankan protokol kesehatan agar kesehatan anak didik maupun civitas di sekolah tetap terjaga.

Bambang juga berharap, pihak sekolah mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti dinas terkait, komite maupun dewan pendidikan tingkat kota dan provinsi. Hal ini agar ada keselarasan antara kebijakan hingga strategi pengajaran guna mencegah terjadinya penurunan kualitas anak didik. **(Dhi)-d**

Deklarasi Kampung Panca Tertib Suronatan

YOGYA (KR) - Saat ini, Kota Yogyakarta dalam pembuangan sampah masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Oleh sebab itu, melalui Panca Tertib terkait lingkungan masyarakat diharapkan dapat mengelola sampah secara mandiri.

Hal itu disampaikan Kabag Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta Taokhid SIP MSi saat Deklarasi Kampung Panca Tertib Suronatan, Minggu (31/10). Pada kesempatan itu, Taokhid menekankan tertib lingkungan dalam Panca Tertib, khususnya dalam pengelolaan sampah. "Saya percaya formulasi rumusan panca tertib di Suronatan yang dihasilkan oleh masyarakat melihat persoalan yang dialami," kata Taokhid.

Melalui deklarasi itu, Kampung Suronatan diharapkan dapat mengimplementasikan poin-poin dalam Panca Tertib. "Dengan dilaksanakannya panca tertib akan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Suronatan," kata Taokhid.

Taokhid yang hadir mewakili Wakil

Walikota Yogyakarta menyampaikan apresiasi pada warga Suronatan yang senantiasa aktif berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah. "Suronatan merupakan wilayah yang aktif dan memiliki banyak potensi sumber daya sehingga tidak heran bila berkiprah dalam pembudayaan ketertiban melalui kampung panca tertib," kata Taokhid.

Bagi Taokhid, kehidupan masyarakat Suronatan yang kompak, guyub rukun dan saling bergotong-royong akan memudahkan dalam berkoordinasi serta menjalankan program yang dirancang.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra, menegaskan, kesiapan DPRD Kota Yogyakarta untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program kampung panca tertib Suronatan.

Dwi yakin, di Suronatan kegiatan kampung panca tertib tidak akan berhenti hanya deklarasi semata. Oleh karenanya Komisi A DPRD Kota Yogyakarta siap untuk memfasilitasi program-program yang akan dijalankan di Suronatan. **(Feb)-d**